

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PEMBINAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SUNGAI
SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

ADRIAN SYAH
NPM : 137310194

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

**PELAKSANAAN TUGAS LURAH DALAM PEMBINAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KELURAHAN SUNGAI
SIBAM KECAMATAN PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

**ADRIAN SYAH
137310194**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki dan juga untuk mengetahui faktor penghambat dari Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki. Metode penelitian yang digunakan ini yaitu tipe Survey Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menggunakan teknik sensus dan purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kelurahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, kusioner dan wawancara. Setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan di analisa dengan menggunakan analisis kuantitatif Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada. Berdasarkan kusioner dan wawancara penelitian diketahui bahwa tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru memiliki kategori cukup baik.

Kata Kunci: Tugas Lurah, Pembinaan, Lembaga Kemasyarakatan

**IMPLEMENTATION OF HEADMAN TASK IN THE
DEVELOPMENT OF COMMUNITY INSTITUTIONS IN SUNGAI
SIBAM VILLAGE, PAYUNG SEKAKI SUB-DISTRICT,
PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

**ADRIAN SYAH
137310194**

The purpose of this study was to determine the implementation of the task of the headman in fostering social institutions in the Sungai Sibam Village Payung Sekaki District and also to determine the inhibiting factors of the Implementation of the headman Task in the Development of Community Institutions in Sungai Sibam Village, Payung Sekaki District. The research method used is descriptive survey type. This research was conducted in Sungai Sibam Sub-District, Payung Sekaki District, Pekanbaru City. The sample is as a member of the population taken using census and purposive sampling techniques. The sample in this study is the Village Government and Neighborhood Association (RT) / Village Community (RW) Village. Data collection techniques used were observation, questionnaire and interview. After the required data is obtained, then the data is grouped and broken down according to its type and analyzed using quantitative analysis. Based on the research results it is known that the development of social institutions is carried out on every institution in the village and consists of RT and RW. This aims to improve the ability and independence of existing social institutions. Based on the questionnaire and research interview, it is known that the task of the headman in fostering social institutions in Sungai Sibam Village, Payung Sekaki District, Pekanbaru City is quite good.

Keywords: Village Chief, Development, Community Institutions

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia yang diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan tugas dalam menyusun skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru”. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi,SH,M.Cl.selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Dr. H. Moris Adidi Y, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
3. Budi Muliando, S.IP,M,Si selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Dr. H. Syafhendry, M.Si sebagai pembimbing I yang telah banyak memberikan saran dan meluangkan waktu demi kesempurnaan penulisan ini.
5. Data Wardana, S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II telah banyak memberikan arahan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau khususnya dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang memberikan banyak ilmu pengetahuan dalam masa perkuliahan.
7. Bapak dan ibu staff tata usaha fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang banyak jasa dalam melayani segala keperluan dan kelengkapan adminitrasi yang dibutuhkan penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, Oktober 2019



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFERHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan	13
B. Penelitian Terdahulu	40
C. Kerangka Pikiran	41
D. Konsep Operasional	42
E. Operasional Variabel	43
F. Teknik Pengukuran	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	47

D. Teknik Penarikan Sampel	48
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Kecamatan Payung Sekaki	52
B. Gambaran Kelurahan Sibam	53

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA

A. Identitas Responden	56
B. Pembahasan	58

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	74
B. Saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
---------------------------------	----

DAFTAR TABEL

I.1 Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018	9
I.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018	9
II.1 Skripsi Terkait Terdahulu tentang fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.....	40
III.1. Populasi dan Sampel Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungaisibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	51
III.2 Jadwal dan Waktu Penelitian	54
IV.1 Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 53	
IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 53	
V.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia	56
V.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin	57
V.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan	57
V.4 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator penyuluhan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	59
V.5 Pelaksanaan Pembinaan Pada Indikator Pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru 63	
V.6 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator Bimbingan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota	

Pekanbaru 66

V.7 Rekapitulasi Indikator Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung
Sekaki Kota Pekanbaru69



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan
Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam
Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru..... 43



PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu sosial dan politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian Syah
NPM : 137310194
Program Studi : Ilmu Pemerintah
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (Tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya meyakini bahwa bersedia menerima saksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Oktober 2019

Pelaku Pernyataan

Adrian Syah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian Negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 dimana daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan dibentuknya pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan serta potensi dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang sampai sekarang ini masih berlaku kedudukan desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan yang paling rendah dalam system pemerintahan di Indonesia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan kecamatan dibentuk dalam pasal 221, sementara kelurahan dibentuk dan diatur dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (2) dikatakan kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Selanjutnya dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ayat (3) lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekda dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan. Dan dalam pasal 229 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ayat (4) lurah mempunyai tugas membantu camat dalam :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melakukan pembedayaan masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat.
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
- e. Memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat.
- g. Peraturan perundang-undangan.

Kelurahan sebagai satuan administrasi pemerintahan terendah yang berkedudukan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan administrasi dengan masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang kedudukan dan tugas lurah Pasal (3) Nomor 73 Tahun 2005. Dalam Pasal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan kelurahan ditegaskan bahwa fungsi Lurah adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- b. Melaksanakan pembangunan
- c. Melaksanakan lembaga kemasyarakatan

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan disebutkan tugas lurah adaah:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat

- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan pada BAB IV susunan organisasi pasal 6

- 1) Kelurahan terdiri dari lurah dan perangkat kelurahan.
- 2) Perangkat kelurahan sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dari sekertaris kelurahan dan seksi sebanyak-banyaknya (4) empat seksi serta jabatan fungsional.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada lurah.
- 4) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi dari pegawai negeri sipil yang diangkaqt oleh sekretaris daerah kabupaten/kota atas usul camat
- 5) Ketetntuan lebih lajut mengenai struktur organiassi dan tata kerja keurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi fungsi Lurah adalah “Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan”. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ditandatangani Menteri Dalam Negeri April 2018 dan diberlakukan setelah diundangkan oleh Dirjen Peraturan

Perundang-undangan Kemenkumham dalam Berita Negara Tahun 2018 Nomor 569 tanggal 27 April 2018 di Jakarta. Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa ini mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna pos pelayanan terpadu, pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakatan yang ada.

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat. Pada pasal 4 Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa

1. LKD bertugas:
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LKD memiliki fungsi:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok yang dijelaskan pada. Pasal 5 ayat 1 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai tugas:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;

- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Lebih lanjut disebutkan Soekanto,(2002;173) bahwa Lembaga Kemasyarakatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok Manusia pada dasarnya mempunyai fungsi :

- a. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
- b. Menjaga keutuhan masyarakat.
- c. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan system pengendalian sosial (*social Control*) artinya system pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku.

Dengan adanya lembaga kemasyarakatan dimaksudkan untuk dapat memelihara dan melestarikan nilai gotong royong, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat secara optimal guna membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/ kelurahan, seperti memberikan RT dan RW

tentang Administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan, serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

Pentingnya pembinaan dilakukan karena selain pemerintah memerlukan Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik dalam pembangunan fisik dan non fisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik di desa atau kelurahan bukanlah lembaga yang betul-betul timbul dari masyarakat desa atau kelurahan tersebut. Karena itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Santoso (2015:52)

Pentingnya pembinaan yang dikemukakan oleh Santoso sudah jelas bahwa pembinaan merupakan suatu kegiatan untuk membimbing atau melatih agar sasaran dalam pembinaan dalam hal ini lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan seperti RT dan RW, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain-lain bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat kelurahan sungai sibam itu sendiri, sehingga nantinya menunjang akan pembangunan guna mensejahterakan kehidupan masyarakat di kelurahan itu sendiri. Dikelurahan Sungai Sibam terdapat bermacam-macam Lembaga Kemasyarakatan yang mendapat Perhatian Untuk dibina, adapun lembaga tersebut yang terdapat di kelurahan sungai sibam yang menjadi fokus penelitian ini adalah Rukun warga dan rukun tetangga.

Kelurahan Sungai Sibam merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki mencapai 78.136 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami penurunan

sebesar 2,7 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 11.481 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Labuh Baru Barat sebesar 2.503 jiwa/km².

Tabel I.1 Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018

Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Labuh Baru Timur	11,8	24.453	2.118
Tampan	4,5	10.986	2.441
Air hitam	5,46	7.547	1.382
Labuh baru barat	5	12.514	2.503
Sungai sibam	7	4.950	707
Bandar raya	13	8.433	648
Tirta siak	5,5	9.253	1682
Jumlah :			11.481

Tabel I.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Labuh Baru Timur	11.541	12.912	24.453
Tampan	5.162	5.824	10.986
Air hitam	3.674	3.873	7.547
Labuh baru barat	6.257	6.257	12.514
Sungai sibam	3.227	1.723	4.950
Bandar raya	4.320	4.113	8.433
Tirta siak	4.928	4.325	9.253
Jumlah	39.109	39.027	78.136

Kelurahan Sungai Sibam merupakan imempunyai Luas 270,41 Ha dengan jumlah penduduk laki-laki 2.906 orang, perempuan 2854 orang jumlah 5760 orang. 1320 orang Kepala Keluarga dan semuanya Warga Negara Indonesia (WNI). Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun

kegiatan masyarakat di kelurahan Sungai Sibam, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahann kelurahan semakin ringan karena dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena-fenomena yang terdapat di kelurahan Sungai Sibam :

1. Dalam tugas pengadministrasian, RT dan RW diberi tugas untuk mencatat dan melaporkan jumlah penduduk yang masuk dan keluar dalam wilayah mereka masing-masing, namun yang terjadi selama ini data kependudukan yang dilaporkan masing-masing RT dan RW asal-asalan dibuat, hal ini menunjukkan kurangnya tugas lurah dalam pengawasan Lurah terhadap tugas yang dilaksanakan oleh RT dan RW.
2. Salah satu tugas RT/RW yang ditetapkan oleh Lurah adalah melaporkan data kependudukan kepada pemerintah setiap bulannya, akan tetapi masih ada beberapa orang RT dan RW yang tidak memberikan laporannya kepada Lurah, hal ini terjadi karena Lurah tidak mengevaluasi laporan yang diterima.
3. Kurangnya perhatian Lurah terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menggerakkan gotongroyong, membuat menurunnya

partisipasi masyarakat, sehingga kebersihan dan keindahan lingkungan tidak terjaga lagi.

4. Tidak diaktifkannya pos ronda di beberapa Daerah Rukun Warga (RW) ataupun Rukun Tetangga (RT) sehingga keamanan dan ketertiban sudah berkurang dalam lingkungan masyarakat.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul: ” *Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru*”

B. Rumusan Masalah

Kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahann kelurahan semakin ringan karena dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan . Namun pada kenyataannya terindikasi pembinaan pada RT dan RW terutama dalam meningkatkan administrasinya belum berjalan dengan baik. Dari penjelasan latar belakang diatas dimana telah dipelihatkan sejumlah gambaran mengenai jalannya pemerintahan beserta mekanismenya, maka penulis merumuskan masalah yakni tentang :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung sekaki Kota Pekanbaru?

2. Apakah sajakah faktor penghambat dari Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat dari Pelaksanaan Tugas Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai evaluasi pelayanan dalam pengurusan kartu tanda penduduk identitas penduduk khususnya di di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki
 - b. Sumbang pikir bagi mahasiswa dan mahasiswi ilmu sosial dan ilmu politik pada umumnya di prodi ilmu pemerintahan khususnya terutama dalam pengembangan kajian ilmu pemerintahan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKAPIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan latar belakang masalah konsep pada penelitian ini maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli dan teori sesuai dengan tujuan penelitian sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengemukakan maupun dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, maka penulis merangkai beberapa pendapat para ahli sesuai dengan tujuan penelitian ini. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafii (2001;23) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (Eksekutif), pengaturan (Legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintahan pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Dari beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan, Inggris menyebutnya "Government" dan Prancis menyebutnya "Gouvernement". Dalam bahasa Arab "Hukumat", Di Amerika Serikat disebut "Administration". Sedangkan Belanda mengartikan "Regering" sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai pengusaha menetapkan

perintah-perintah (Ndraha,2010;4). Sedangkan pemerintah adalah yang berwenang memproses layanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintah.

Pemerintahan adalah orang-orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan yang diperintah (Ndraha, 2010;6).

Kemudian yang disebut pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia wajib melayankannya (Ndraha, 2010;7).

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan terbagi menjadi 3 fungsi, yaitu:

- a. Fungsi pembangunan
- b. Fungsi pemberdayaan
- c. Fungsi pelayanan

Lebih lanjut bahwa yang dikatakan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan,

(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha,2010;).

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa daerah seperti penjelasan undang-undang dasar 1945. Oleh karena itu dalam melaksanakan roda pemerintahannya, pemerintah pusat dibantu oleh daerah, sehingga masalah-masalah pemerintahan tidak hanya terbebani oleh pemerintahan pusat saja.

Menurut Muhammad Hatta, pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi) merupakan salah satu aspek pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi). Menurut dasar kedaulatan rakyat, hak rakyat menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pimpinan negeri, tetapi juga pada setiap tempat di kota, desa dan daerah (dalam Rosidin, 2010;39).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip, Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 (Undang-Undang No.23 Tahun 2014).

2. Pemerintahan Daerah

Dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah Pasal 18 Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan, bahwa pembagian wilayah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak-hak usul-usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat daerah otonom dalam kerangka asas desentralisasi, berubah perannya menjadi perangkat daerah otonom yang melaksanakan urusan pemerintahan umum dan kelurahan yang sebelumnya merupakan wilayah kerja lurah saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa lurah menjadi perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Dalam hal ini camat dan lurah selaku perangkat kecamatan juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan). Karena melaksanakan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.

3. Fungsi Pemerintah Daerah

U Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya tersebut menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.

Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

3. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
5. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan menggunakan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum penyelenggara negara yang di dalam hukum dikenal dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Layak.

Fungsi menyelenggarakan pemerintahan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah. Ada sejumlah alasan rasional tentang perlunya pemerintahan daerah yang menekankan kepada desentralisasi dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. Beberapa alasan yang menyebabkan sehingga pemerintah daerah penting menurut Ni'matul Huda (2009: 95) sebagai berikut:

1. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, kita

harus menyadari bahwa pada saat sekarang ini masyarakat Indonesia sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah demokrasi.

2. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
3. Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional..Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
4. Keadilan. Desentralisasi/ otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

4. Konsep Kelurahan

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan wilayahkerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Kelurahan di pimpin seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi lurah adalah segala tindakan, kegiatan dan segala aktifitas-aktifitas yang dilakukan oleh lurah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintah di wilayah kelurahan. Adapun tugas lurah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yaitu dalam pasal 4 ayat (1) ditegaskan bahwa Lurah adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, melaksanakan Pembangunan dan kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan fungsi Lurah adalah:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

Kansil, (2003:190) mendefinisikan kebijakan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Sutupo, (2001;10) kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang diajukan untuk kepentingan masyarakat, kebijakan public bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Nugroho, (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau golongan. Kebijakan (*policy*) dalam pemerintahan hendaknya dibedakan dengan kebijakan (*wisdom*) karena kebijakan merupakan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang.

Disamping itu kebijakan (*policy*) dapat juga kita katakan atau kita pergunakan untuk menuju perilaku seseorang, aktor (misalnya seorang pejabat,

suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) ataupun sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. (Inu Kencana,2009: 105)

Dunn, (2003;22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penelitian kebijakan.

5. Konsep Pembinaan

Menurut Miftah Thoha, (2007;8) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua pembinaan itu bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan menurut Santoso, (2015;52) adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Pembinaan disiplin kerja pegawai adalah rangkaian usaha untuk melatih dan meningkatkan sikap kesediaan pegawai menaati peraturan yang berlaku.

Menurut Santoso, (2015;60) pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Meburut kamus besear bahasa Indonesia kata penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor. Sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan dan penunjuk jalan. Sehingga makna arti dalam kata penyuluhan adalah suatu proses atau cara yang dilakukan oleh penyuluhan untuk memberikan penerangan atau informasi kepada orang lain dari semula yang tidak tahu menjadi tahu dan yang tau menjadi lebih tau. Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun indikatornya adalah :

- a. Membuat program penyuluhan.
 - b. Adanya pertemuan, diskusi dan musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
 - c. Melaksanakan program yang telah diatur.
 - d. Mengevaluasi program dari hasil tersebut.
2. Pengarahan

Menurut saure dan Dislainer dalam Wanadiana (2010:34) pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksankan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu. Pengarahan adalah kegiatan yang dilakukan lurah untuk memberi arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan.
- b. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa.

3. Bimbingan

Menurut Sunaryo Kartadinata (2008:12) bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkeseimbangan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Thoah, (2007:7) pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal pembinaan ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang dan perubahan atas sesuatu.

Menurut Manullang, (2009:11) pembinaan adalah usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau intruksi kepada bawahan-nya dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

6. Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi. 2
7. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan. 3
8. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
9. Memberi pembenaran yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahankesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto Dalam Raharjo (2004;162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (Dalam Raharjo, 2004;162) pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat.

Dari ketiga definisi diatas jelas jelas tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu system atau kompleks nilai dan norma. System nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut (Raharjo, 2004;162).

Selanjutnya Soekanto (2002;197) menjelaskan lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada menggunakan istilah “pranata social”, tetapi *social-institution* menunjukkan adanya unsur-unsur yang mengatur prilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata social adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata

kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain diusulkan adalah “bangunan sosial” yang mungkin terjemahan dari istilah *Soziale- Gebilde* (bahasa Jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan suasana *social-institution* tersebut.

Adapun ciri-ciri umum menurut Gillin (dalam Soekanto, 2002;2009) didalam karyanya yang berjudul *General features of social institution* adalah sebagai berikut :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri adat-istiadat, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyaraktan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan tugas lembaga yang bersangkutan pembedaan antara tujuan dengan tugas sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, tugas social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin tugas tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi didalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya gegaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila di dorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga terdapat secara simbolis menggambarkan tujuan dan tugas lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji; perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan

lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.

6. Satu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Lebih lanjut, Gillin (dalam Soekanto, 2002;211;212) mengklasifikasikan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan antara lain sebagai berikut:

1. *Crescive institution* dan *enacted institution* yang merupakan klasifikasi dari sudut perkembangannya. *Crescive institution* yang juga disebut lembaga-lembaga paling primer, merupakan lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adatistiadat masyarakat. Contohnya adalah hak milik, perkawinan, agama dan seterusnya. *Enacted institution* dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan dan lembaga-lembaga pendidikan, yang kesemuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Pengalaman melaksanakan kebiasaan-kebiasaan tersebut kemudian disistemisasi dan diatur untuk kemudian dituangkan kedalam lembaga-lembaga yang disahkan oleh Negara.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, timbul klasifikasi atau *basic institution* dan *subsidiary institution*. *Basic institution* dianggap sebagai lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara

dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia, misalnya keluarga, sekolah-sekolah, negara dan lain sebagainya dianggap sebagai *basic institution* yang pokok. Sebaliknya adalah *subsidiary institutiob* yang dianggap kurang penting seperti misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Ukuran apakah yang dipakai untuk menentukan suatu lembaga kemasyarakatan yang dianggap sebagai *basic* dan *subsidiary*, berbeda dimasing-masing masyarakat. Ukuran-ukuran tersebut juga tergantung dari masa hidup masyarakat tadi berlangsung. Misalnya sirkus pada zaman Romawi dan Yunani Kuno dianggap sebagai *basic institution*; pada dewasa ini kiranya tak akan dijumpai suatu masyarakat yang masih mempunyai keyakinan demikian.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat dapat dibedakan *approved* atau *social sanctioned-institution* dan *unsanctioned institution*. *Approved* atau *social sanctioned-institution* adalah lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti misalnya sekolah, perusahaan dagang dan lain-lain. Sebaliknya adalah *unsanctioned institution* yang ditolak oleh masyarakat, walau kadang-kadang masyarakat tidak berhasil memberantasnya. Misalnya kelompok penjahat, pemeras, pencuri dan sebagainya.
4. Pembedaan antara *general institution* dengan *restrited institution*, timbul apabila klasifikasi tersebut didasarkan pada factor penyebarannya. Misalnya agama merupakan suatu *general institution*, karena dikenal oleh hampir semua masyarakat dunia. Sedangkan agama-agama islam,

protestan, katolik, budha danlain-lainnya, merupakan *restricted institution*, oleh karena dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu di dunia ini.

5. Sudut fungsinya terdapat perbedaan *operative institution* dan *regulative institution*. Yang pertama berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan, seperti misalnya lembaga industrilisasi. Yang kedua, bertujuan untuk mengawasi adat-istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi lembaga itu sendiri. Suatu contoh adalah lembaga-lembaga hukum seperti kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya.

7. Fungsi Kelembagaan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakasa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup;
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Lembaga adat mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah Desa dan Lurah. Lembaga adat mempunyai fungsi:

- a. Penampungan dan penyaluran pendapat aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa dan lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum, adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta

memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan

- c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat pemerintah desa dan lurah.

RT/RW mempunyai tugas membantu pemerintah desa atau kelurahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. RT/RW mempunyai fungsi:

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Karang Taruna mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitif, maupun mengembangkan potensi generasi muda di lingkungannya. Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;

- c. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terutama generasi muda dilingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkeseimbangan;
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetia kawan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan swadaya;
- h. Penyelenggara rujukan, pendamping dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Lembaga kemasyarakatan lainnya di Desa yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

8. Konsep/Teori Manajemen Pemerintahan

Manajemen menurut G.R. Terry dalam buku *prinsiples of manajement*, merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (dalam Permadi,2010;11).

Stoner dan Freeman Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, supaya organisasi dan proses penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan (dalam Sunyoto 2012;3).

Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada sektor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu parpta atau tujuan kerja tertentu (dalam Ndraha, 2010: 268).

Adapun fungsi-fungsi manajemen Hendry Foyal (1916) (dalam Pasalong, 2013;4).

antara lain:

1. Planning (perencanaan);
2. Oraganizing (pengorganisasian);

3. Comannding (pengarahan);
4. Coordinating (koordinasi);
5. Controlling (pengawasan).

Stoner menjelaskan kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dari anggota kelompok (dalam Pasalong, 2013;4).

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, atau seni mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok (Permadi, 2010;12).

Teori kepemimpinan (Kartono, 2011;31-32) adalah pengeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, sifat-sifat utama pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan.

Konsep kepemimpinan adalah (cara atau teknik = gaya) yang digunakan pemimpin dalam mempengaruhi pengikut bawahannya dalam melakukan kerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan (Pasolong, 2013;05).

Kemudian Kartono mengatakan kepemimpinan adalah “kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha kooperati mencapai tujuan yang sudah direncanakan (dalam Pasolong, 2013;5).

Kemudian fungsi kepemimpinan Nawawi, et.al (2004; 75-81) adalah:

1. Fungsi intruktif;
2. Fungsi konsultatif;
3. Fungsi partisipatif;
4. Fungsi delegasi; dan
5. Fungsi pengendalian.

Sedangkan pemimpin menurut Moekijat adalah:

- a. Seorang pemimpin adalah seseorang yang membimbing dan mengarahkan/menjuruskan orang-orang lain.
- b. Seorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mengarahkan orang-orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- c. Seorang pemimpin adalah seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut bertanggung jawab, kepada orang-orang bawahannya, terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan dibawah pimpinanya (dalam Permadi, 2010;10).

Menurut Hicks dan Gullet mengatakan pemimpin yang aktif mampu memberikan pengarahan terhadap usaha semua pekerja dan pencapaian birokrasi (dalam Pasolong, 2013;20).

Adapaun tugas pemimpin menurut Stoner adalah:

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain, seorang pemimpin bertanggung jawab untuk bekerja dengan orang lain, salah satu dengan atasannya, staf, teman sekerja atau atasan lain dalam organisasi sebaik orang diluar organisasi;

2. Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan (akuntabilitas), seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun tugas, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi, untuk mencapai outcome yang terbaik, pemimpin bertanggung jawab untuk kesuksesan staffnya tanpa kegagalan;
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas, proses kepemimpinan dibatasi sumber, jadi pemimpin harus dapat menyusun tugas dengan mendahulukan prioritas, dalam upaya pencapaian tujuan pemimpin harus dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada staff, kemudian pemimpin harus dapat mengatur waktu secara efektif, dan menyelesaikan masalah secara efektif;
4. Pemimpin harus berfikir secara analitis dan konseptual, seorang pemimpin harus menjadi seseorang pemikir yang analitis dan konseptual. Selanjutnya dapat mengidentifikasi masalah dengan akurat, pemimpin harus dapat menguraikan seluruh pekerjaan menjadi lebih jelas dan kaitannya dengan pekerjaan lain;
5. Manajer adalah seorang mediator, konflik salah satu terjadi pada setiap tim dan organisasi. Oleh karena itu pemimpin harus dapat menjadi seorang mediator (penengah);
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat, seorang pemimpin harus mampu mengajak dan melakukan kompromi, sebagai seorang diplomat, seorang pemimpin harus dapat mewakili tim atau organisasi;

7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit, seorang pemimpin harus dapat memecahkan masalah.

Sedangkan menurut Kartono (2011;62) fungsi pemimpin adalah:

1. Memprakarsai struktur organisasi;
2. Menjaga adanya koordinasi dan integrasi organisasi;
3. Merumuskan tujuan institusional atau organisasional dan menentukan sarana dan cara-cara yang efisien untuk mencapai tujuan;
4. Mengenai pertentangan dan konflik-konflik yang muncul, dan mengadakan evaluasi;
5. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi pembangunan dan penyempurnaan organisasi.

Kepemimpinan yang efektif hanya akan terwujud apabila dijalankan sesuai dengan fungsinya. Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok/organisasi, oleh karena itu fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, karena diwujudkan dalam interaksi antar individu didalam situasi sosial.

9. Pelayanan Publik

Pelayanan umum atau pelayan publik menurut Wasistiono (2001;51-52) adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah atau pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Menurut Moenir (2003:82) terdapat beberapa factor pendukung pelayanan yang penting, yaitu:

- a. Faktor kesadaran petugas yang berkecimpung dalam pelayanan, kesadaran disini berfungsi sebagai acuan dasar yang melandasi pada perbuatan atau tindakan yang berikutnya.
- b. Faktor aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan yaitu merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang.
- c. Faktor organisasi yang meliputi pengaturan struktur organisasi yang menggambarkan hierarki pertanggung jawaban, pembagian kerja, yang berdasarkan keahlian dan berfungsi masing-masing bagian sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta pengembangan organisasi.
- d. Faktor pendapatan yang meliputi gaji yang dapat menggairahkan semangat kerja yang tinggi.
- e. Faktor kemampuan dan keterampilan kerja dapat ditingkatkan dengan pemberian bimbingan dan petunjuk kerja mengadakan pendidikan dan pelatihan khusus pegawai.
- f. Faktor sarana dan pelayanan yang meliputi peralatan, perlengkapan dan juga tersiapnya fasilitas pelayanan yang meliputi gedung dengan segala kegiatannya fasilitas komunikasi dan fasilitas lainnya.

Pelayanan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila adanya kerja sama antara pihak yang melayani dengan pihak yang dilayani guna dapat memenuhi kebutuhan masing-masing.

Adapun pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktifitas seseorang, sekelompok orang dan organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan, (Pasolong,2008:128).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini adalah penelitian lanjutan. adapun penelitian terdahulu penelitian ini adalah sebagai berikut

Table II.1. Skripsi Terkait Terdahulu Tentang Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Persamaan dan Perbedaan

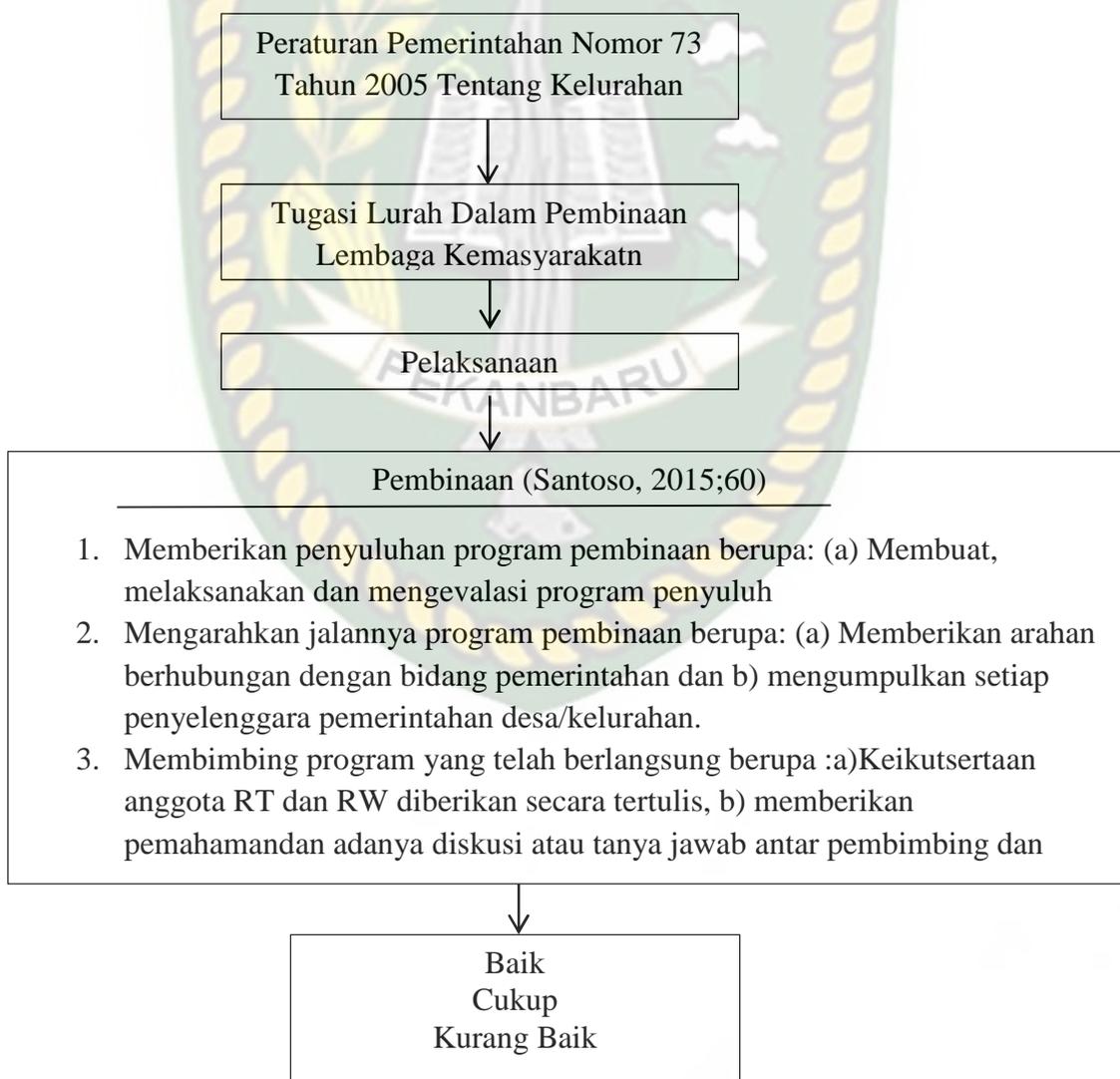
No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ichwann Hastona (2014)	Fungsi Pembinaan Lurah Terhadap Rukun Tetangga Dan Rukun Warga Di Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014	Sama-sama meneliti fungsi lurah	Penelitian pertama membahas fungsi lurah terhadap RT dan RW sedangkan penelitian peneliti membahas fungsi Lurah terhadap Lembaga Kemasyarakatan
2	Roni Palsa (117311000) Tahun 2013	Fungsi Pembinaan Pemerintahan Kepenghuluan Terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kepenghuluan Di Kepenghuluan Bagan Nibung Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015-2016	Sama-sama meneliti variabel pembinaan	Penelitian kedua membahas fungsi pembinaan pemerintah kepenghuluan terhadap lembaga kemasyarakatan, sedangkan penelitian peneliti membahas fungsi lurah terhadap lembaga kemasyarakatan

Sumber: Modifikasi Penulis

C. Kerangka Pikiran

Krangka pikiran ini adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi serta mekanisme hubungan lembaga sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pikiran dari penelitian dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut

Gambar II.1. Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru



D. Konsep Operasional

Untuk menghindari salah penafsiran persepsi atas istilah yang digunakan maka diberikan konsep yang dioperasionalkan sebagai berikut:

1. Kelurahan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja lurah sebagai prangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
2. Lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.
3. Lembaga kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
4. Pembinaan lurah, yang dimaksud pembinaan adalah serangkaian kegiatan pembinaan berupa pembimbingan, pengarahan, pendidikan dan latihan serta pemberian penghargaan oleh lurah terhadap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang ada di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki.
5. Memberikan penyuluhan program pembinaan yaitu membuat, melaksanakan dan mengevaluasi program penyuluh
6. Mengarahkan jalannya program pembinaan yaitu memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan dan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan
7. Membimbing program yaitu memastikan keikutsertaan anggota RT dan RW diberikan secara tertulis, mmeberikan pemahaman dan adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing

E. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.1: Operasional Variabel tentang Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Konsep Operasional	Variabel	Indikator	Dimensi	Kategori Ukuran
Pelaksanaan	Pembinaan	1. Penyuluhan	1. Membuat program penyuluhan. 2. Melaksanakan program yang telah dibuat. 3. Mengevaluasi program dari hasil	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Pengarahan	1. Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan. 2. Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Bimbingan	1. Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis. 2. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. 3. Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber: Olahan Peneliti 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksana variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah baik, cukup baik, kurang baik.

Untuk melihat hasil pelaksanaan fungsi lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut:

- Terlaksana** : Apabila semua indikator Evaluasi Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 71-100%
- Cukup Terlaksana** : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru telah menjalankan dua hingga tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori cukup baik 34-70%
- Kurang Terlaksana** : Apabila penilaian indikator Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru hanya menjalankan satu indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori kurang baik 0-33%

Selanjutnya pengukuran yang diberikan masing-masing indikator penilaian adalah sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian mendapatkan tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Kurang Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

2. Pengarahan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Kurang Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

3. Bimbingan

Terlaksana : Apabila semua item penilaian mendapat tanggapan respon baik dengan persentase 71-100%

Cukup Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian cukup baik dengan persentase 34-70%

Kurang Terlaksana : Apabila tanggapan responden terhadap item penilaian tidak baik dengan persentase 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam suatu penelitian seorang peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Ahmad, 2009:100). Metode ini adalah suatu bentuk metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa kantor lurah merupakan perangkat daerah yang cukup penting dan berperan dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan khususnya Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) sehingga sesuai data dilapangan

mengenai pembinaan terhadap Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) terlihat masih banyak permasalahan-permasalahan dilapangan.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang membedakannya adalah menurut Usman dan Akbar (2011:42) menyatakan: populasi populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.

Sedangkan Sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar 2011:43), yang menjadi Sempel dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Kelurahan dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) Kelurahan, PKK dan dan Karang Taruna. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah Populasi dan Sampel yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.I. Populasi dan Sampel Penelitian Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

NO	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah	1	1	100%
2	Sekretaris Lurah	1	1	100%
3	Rukun Warga (RW)	6	3	50%
4	Rukun Tetangga (RT)	12	6	50%
5	Masyarakat Kelurahan	4.950	9	-
	Jumlah	4.970	20	

Sumber : Kantor Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini teknik penarikan Sampel yang digunakan ada dua teknik yaitu teknik sensus karena jumlah populasi aparatur pemerintah tergolong kecil yaitu 1 orang Lurah dan 1 orang Sekretaris Lurah, selanjutnya teknik purposive sampling yang mana teknik penarikan berdasarkan tujuan dan alasan tertentu. Peneliti mengambil dan membatasi sampel dan Rukun Warga (RW) menjadi 3 orang yaitu RW 1, RW 2 dan RW 5 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 6 orang yang terdiri dari RT 1 dan 2 dari RW 1, RT 2 dan RT 3 dari RW 2, RT 1 dan 2 dari RW 5 yang mana dapat mewakili keseluruhan populasi dan mengetahui tentang permasalahan penelitian, masyarakat kelurahan diambil sebagai sampel secara purposive sebanyak 9 orang, sehingga jumlah keseluruhan sampel 20 orang.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer merupakan suatu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisisioner, observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
2. Data skunder, adalah data yang telah tersedia, diperoleh dengan membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada kantor Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi menurut Supriyati (2011:46) adalah suatu cara untuk mengumpulkan data penelitian dengan mempunyai sifat dasar naturalistik yang berlangsung dalam konteks natural, pelakunya berpartisipasi secara wajar dalam interaksi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung pada lokasi penelitian, untuk mendapatkan informasi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Fungsi Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

2. Kuesioner

Menurut Sugiyono (2008:199) Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. dalam hal ini kusioner adalah memberikan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk diisi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi sehubungan dengan masalah penelitian.

3. Interview (wawancara)

Menurut Sugiyono (2008:72) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai masalah penelitian ini.

4. Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Suharsimi Arikanto (2011:201) adalah barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Survey Deskriptif, dimana setelah data yang diperlukan diperoleh, lalu data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan di analisa dengan menggunakan analisis kuantitatif, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian kemudian di analisa selanjutnya diambil kesimpulan.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 : Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Februari 2019				Juni 2019				Juli 2019				Agustus 2019				September 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Peyusunan Up	■	■	■	■	■															
2	Seminar up																				
3	Revisi up							■													
4	Revisi Quisioner								■												
5	Rekomendasi Survey												■								

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Kecamatan Payung Sekaki

Kecamatan Payung Sekaki merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 187 RT. Luas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah 51,36 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Labuh Baru Timur : 11,80 km²
- b. Kelurahan Tampan : 4,45 km²
- c. Kelurahan Air Hitam : 5,46 km²
- d. Kelurahan Labuh Baru Barat : 8.80 km²
- e. Kelurahan Bandar Raya : 8.90 km²
- f. Kelurahan Sungai Sibam : 6,40 km²
- g. Kelurahan Tirta Siak : 5,55 km².

Batas-batas wilayah Kecamatan Payung Sekaki adalah:

- a. Sebelah timur : berbatasan dengan Kecamatan Sukajadi dan Kecamatan Senapelan
- b. Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- c. Sebelah utara : berbatasan dengan Kecamatan Rumbai
- d. Sebelah selatan : berbatasan dengan Kecamatan Tampan dan Kecamatan Marpoyan Damai

B. Gambaran Kelurahan Sibam

Kelurahan Sungai Sibam merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Kecamatan Payung Sekaki mencapai 78.136 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami penurunan sebesar 2,7 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 11.481 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Labuh Baru Barat sebesar 2.503 jiwa/km².

Tabel IV.1 Luas, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018

Kelurahan	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
Labuh Baru Timur	11,8	24.453	2.118
Tampar	4,5	10.986	2.441
Air hitam	5,46	7.547	1.382
Labuh baru barat	5	12.514	2.503
Sungai sibam	7	4.950	707
Bandar raya	13	8.433	648
Tirta siak	5,5	9.253	1682
Jumlah :			11.481

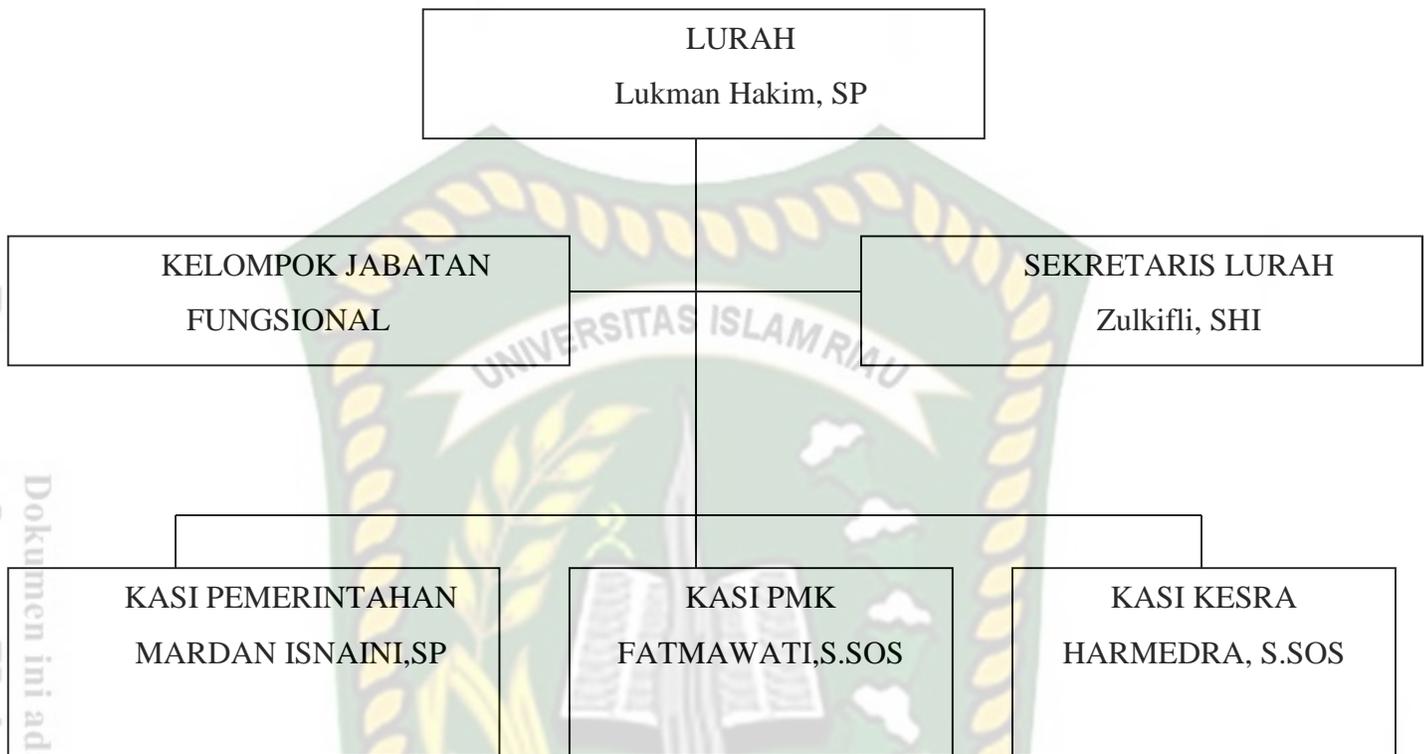
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa wilayah terluas Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018 adalah Kelurahan Labuh Baru Timur yaitu 11,8 KM², sedangkan Kelurahan Sungai Sibam sendiri adalah 7 KM², dengan jumlah penduduk 4.950 serta kepadatan jiwa 707 (Jiwa/Km²)

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kecamatan Payung Sekaki Tahun 2018

Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Labuh Baru Timur	11.541	12.912	24.453
Tampan	5.162	5.824	10.986
Air hitam	3.674	3.873	7.547
Labuh baru barat	6.257	6.257	12.514
Sungai sibam	3.227	1.723	4.950
Bandar raya	4.320	4.113	8.433
Tirta siak	4.928	4.325	9.253
Jumlah	39.109	39.027	78.136

Kelurahan Sungai Sibam merupakan imempunyai Luas 270,41 Ha dengan jumlah penduduk laki-laki 2.906 orang, perempuan 2854 orang jumlah 5760 orang. 1320 orang Kepala Keluarga dan semuanya Warga Negara Indonesia (WNI). Selain melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dalam membangun kegiatan masyarakat di kelurahan Sungai Sibam, kegiatan lurah yang lain adalah melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di kelurahan sebagai salah satu tugas lurah dalam melaksanakan tugas pemerintahan karena bila Pembinaan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan berhasil, maka tugas pemerintahann kelurahan semakin ringan karena dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan yang ikut bersama pemerintah kelurahan menjalankan kegiatan pembangunan.

Adapun struktur Organisasi Kelurahan Sibam adalah sebagai berikut:



Sumber: Kelurahan Sibam, 2019.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden yang digunakan sebagai sumber data dalam penelitian berjumlah 20 orang dengan identitas sebagai berikut:

1. Tingkat Usia

Secara teoritis faktor usia akan mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Disisi lain tingkat usia juga akan mempengaruhi seseorang dalam setiap melakukan aktivitas dalam kehidupannya, usia seseorang cenderung mempengaruhi pola pikir dalam bekerja. Adapun tingkat usia responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.1 Identitas Responden Menurut Tingkat Usia

No.	Tingkat Usia (Tahun)	Frekuensi	Persentase
1.	20	-	-
2.	21 – 29	5	25%
3.	30 – 39	8	40%
4.	40	7	35%
Jumlah		20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Dari tabel 5.1 dapat diketahui tingkat umur responden yang merupakan sampel penelitian ini yaitu berusia 21-29 tahun sebanyak 5 orang, kemudian 8 orang berusia 30 – 39 tahun dan 7 orang diatas 40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Jumlah responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Laki-laki	12	60%
2.	Perempuan	8	40%
	Jumlah	20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 atau 60% sampel berjenis kelamin laki-laki dan 8 atau 40% adalah perempuan.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pada dasarnya berkaitan erat dengan produktivitas pekerjaan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin bagus pola berfikirnya. Tingkat pendidikan seseorang pada umumnya menentukan sikap dan tindakan seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Tabel V.3 Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SLTA	6	30 %
2.	D3	4	20 %
3.	Sarjana (S1)	7	35 %
4.	Sarjana (S2)	3	15 %
	Jumlah	20	100%

Sumber : Olahan Data 2019

Pada tabel diatas 5.3 diatas dapat diliat bawa dari 20 orang responden, terdapat sebanyak 6 orang responden (30%) berpendidikan SLTA atau dibawa SLTA dan 4 orang responden (20%) berpendidikan D3, kemudian 7 responden (35%) berpendidikan sarjana (S1) dan 3 orang responden (15 %) berpendidikan pasca sarjana (S2). Dengan demikian pada umumnya jumlah responden dalam penelitian ini sebahagian besar adalah berpendidikan S1.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dilakukan terhadap setiap lembaga yang ada di kelurahan dan terdiri dari RT dan RW, PKK, Karang Taruna hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari lembaga kemasyarakata yang ada. Dari sejumlah Tugas yang menjadi tanggung jawab seorang lurah maka ini menggambarkan bahwa ruang lingkup kegiatan lurah disamping tugas-tugas lain, yakni melaksanakan sejumlah tugas pokok salah satunya adalah pembinaan lemabaga kemasyarakatan. Adapun upaya pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk antara lain sebagai berikut:

a) Penyuluhan

Penyuluhan adalah kegiatan yang dilakukan lurah dalam membekali anggota/perangkat kelembagaan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan Tugasnya. Adapun indikatornya adalah :

- a. Membuat program penyuluhan.
- b. musyawarah yang dibuat Lurah untuk pembahasan suatu persoalan dengan maksud mencapai keputusan bersama.
- c. Melaksanakan program yang telah diatur.
- d. Mengevaluasi program dari hasil tersebut.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru :

Tabel V.4 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator penyuluhan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

NO	Sub indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Membuat program penyuluhan	5 (25%)	8(40%)	7 (35%)	20(100%)
2	Melaksanakan program yang telah dibuat	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	20 (100%)
3	Mengevaluasi program	6 (30%)	9 (40%)	5 (25%)	20 (100%)
	Jumlah	16 (26,66%)	30 (50%)	14 (23,33%)	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai membuat program penyuluhan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam paling dominan berada ada kategori Cukup Baik, yaitu sebanyak 8 responden (40%). Responden lainnya menanggapi

dengan kategori baik 6 responden (25%) dan kurang baik sebanyak 7 responden (35%).

Pada Sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai melaksanakan program penyuluhan yang telah dibuat pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru menunjukkan 5 responden (25%) pada kategori baik, 13 responden (65%) pada kategori cukup baik dan 2 responden (10%) pada kategori kurang baik .

Pada Sub indikator ketiga diketahui bahwa jawaban respon mengenai mengevaluasi program penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru paling dominan berada ada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 9 responden (40%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori baik sebanyak 6 responden (30%) dan kategori Kurang baik sebanyak 6 responden (30%).

Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai membuat penyuluhan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam paling dominan berada ada kategori Cukup baik, yaitu sebanyak 50%. Jika diuraikan setiap sub indikator didapat bahwa dalam sub indikator membuat program penyuluhan berada pada kategori cukup baik yaitu 40%. Kemudian pada sub indikator melaksanakan program yang telah dibuat berada pada kategori cukup baik yaitu 65%. Begitu juga pada sub indikator mengevaluasi program dari hasil berada pada kategori cukup baik, yaitu 40%.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Lurah Sungai Sibam mengenai Penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam pada kutipan wawancara berikut ini:

“Program penyuluhan itu sudah di buat dari awal periode saya yang akan digunakan untuk melaksanakan keseluruhan program-program pembinaan pada masyarakat. Program-program ini dibuat untuk keperluan masyarakat banyak, mulai dari kegiatan keamanan, kekeluargaan dan kegotong royong sesuai dengan lembaga masing-masing. Dan hal ini tidak saja dibuat dan dilaksanakan, bagian dari kantor lurha juga meninjau langsung program tersebut apakah sudah berjalan atau belum, jika sudah berjalan bagaimana perkembangannya, dan jika terkendala akan dicari tau hambatannya agar lembaga dapat berfungsi sebagai mana mestinya”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Lurah di Kelurahan Sungai Sibam telah membuat program penyuluhan untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan dan melaksanakan program yang telah dibuat dan mengevaluasi jalannya program pada di Kelurahan Sungai Sibam.

Wawancara di atas sejalan dengan hasil observasi penelitian ini dimana sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa peneliti menemukan rangkaian program untuk pembinaan lembaga kemasyarakatan di kantor Kelurahan Sungai Sibam. Pada program tersebut dapat dilihat tujuan program, aktivitas program dan penanggung jawab program. Pada tujuan program pada umumnya adalah membantu lembaga lembaga kemasyarakatan dengan cara memberikan latihan atau pendidikan melalui penyuluhan. Penyuluhan ini juga memiliki aktivitas penyuluhan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Peneliti juga menemui bahwa program ini diadakan dibawah tanggung jawab kelurahan, dimana kelurahan akan mengevaluasi program ini apakah sudah berjalan

atau belum dengan cara langsung mengobservasi kelapangan. Hal ini dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Pihak berwenang kelurahan yang bertugas mengawasi jalannya kelembagaan akan memastikan jalan atau tidaknya program penyuluhan yang telah diberikan.

b) Pengarahan

Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pembinaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain.

Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara kelompok maupun secara individu, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan kecenderungannya berorientasi kepada peranan yang dimainkan lembaga kemasyarakatan itu sendiri dalam memenuhi kebutuhannya dari pada berorientasi kepada pencapaian tujuan. Pengarahan merupakan petunjuk untuk melaksanakan sesuatu, atau perintah resmi seseorang pemimpin kepada bawahannya berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu.. Adapun indikatornya adalah memberikan arahan yang berhubungan dalam bidang pemerintahan, dan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa.

Berikut ini adalah tanggapan responden mengenai pengarahan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam:

Tabel V.5 Pelaksanaan Pembinaan Pada Indikator Pengarahan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

NO	Indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan	11 (55%)	9 (45%)	0	20(100%)
2	Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	15 (75%)	5 (25%)	0	20 (100%)
	Jumlah	26 (65%)	14 (25%)	0	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan pada pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dikategorikan kepada katergi baik, kategori cukup baik dan kategori kurang baik. Berdasarkan hasil kuisisioner diketahui bahwa paling dominan berada ada kategori cukup baik, yaitu sebanyak 11 responden (55%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori baik sebanyak 9 responden (45%).

Pada sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan di Kelurahan

Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru menunjukkan 15 responden (75%) pada kategori baik dan 5 responden (25%) berada pada kategori cukup baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai pelaksanaan pembinaan pada indikator pengarahannya dalam pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru paling dominan berada pada kategori Baik, yaitu sebanyak 65%. Pada sub indikator memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan berada pada kategori baik yaitu 55%. Kemudian pada sub indikator mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan pada kategori baik yaitu 75%.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Sungai Sibam mengenai Penyuluhan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam pengarahannya Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam pada kutipan wawancara berikut ini:

“Pengarahan sangat penting dalam suksesnya program ini. Kegiatan awal yang dilakukan setelah program itu dibuat adalah evaluasi pelaksanaannya, dari hasil evaluasi pada pembinaan tersebutlah nanti kami akan mengarahkan. Pemberiaan arahan ini dijadwalkan secara teratur dan juga dalam pemberian pengarahannya ini akan dihadiri pihak masyarakat dan juga pihak lurah untuk berdiskusi mengenai masing-masing permasalahan kelembagaan”.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa lurah telah memberikan pengarahannya pada pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam dengan waktu tertentu secara teratur dan pihak kelurahan secara bersama – sama dengan lembaga dan masyarakat untuk membahas permasalahan dalam lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil observasi penelitian ini diketahui bahwa program pembinaan ini benar dilaksanakan. Selain memberikn penyuluhan bagi kelambagaan, pihak kelurahan juga melakukan pengarahan. Pengarahan adalah langkah seanjutnya setelah penyuluhan. Dalam pengarahan pihak kelurahan akan melihat hasil penyuluhan yang telah diberikan dengan cara mengadakan rapat. Rapat yan diadakan adalah 1 kali dalam sebulan dengan mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan. Dalam rapat ini akan dibahas evaluasi penyuluhan dan mengadakan pelaksanaan. Program pengarahan yang dilakukan diadakan secara teratur setiap bulannya dan mengundang dengan undangan resmi kepada setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.

c) Bimbingan

Lembaga Kemasyarakatan kelurahan merupakan lembaga bentukan masyarakat bukan bentukan pemerintah, dan pembentukannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintahan kelurahan, serta menjadi mitra bagi lurah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Sebuah bimbingan harus dilakukan secara terus menerus dan berkeselimbangan. Dalam melakukan bimbingan, harus dilakukan secara sistematis dan terarah supaya tercapai tujuan yang diinginkan. Bimbingan merupakan usaha-usaha yang dilakukan Lurah untuk mengajak, mengiring serta mendorong agar Lembaga Kemasyarakatan dapat menjalankan tugas dan Tugasnya masing-masing. Adapun indikatornya adalah :

- a. Kegiatan yang dilakukan atau diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis.
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

Tabel V.6 Pelaksanaan Pembinaan pada indikator Bimbingan dalam Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

NO	Indikator	Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	20 (100%)
2	Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan	5 (25%)	14 (70%)	1 (5%)	20 (100%)
3	Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	20 (100%)
	Jumlah	18 (30%)	33 (55%)	9 (15%)	

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jawaban respon mengenai kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan

secara tertulis menunjukkan 10 responden (50%) pada kategori baik, dan 8 responden (40%) pada kategori cukup baik dan 2 responden (10%) pada kategori kurang baik.

Pada sub indikator kedua diketahui bahwa jawaban respon mengenai peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan paling dominan berada ada kategori baik, yaitu sebanyak 5 responden (25%). Responden lainnya menanggapi dengan kategori cukup baik sebanyak 14 responden (70%) dan responden menanggapi dengan kategori kurang baik sebanyak 1 responden (5%).

Pada Sub indikator ketiga diketahui bahwa jawaban respon adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing dalam kegiatan menunjukkan 3 responden (15%) pada kategori baik, dan 11 responden (55%) pada kategori cukup baik dan 6 responden (30%) berada pada kategori kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jawaban respon mengenai pelaksanaan pembinaan pada indikator bimbingan dalam pelaksanaan tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru paling dominan berada ada kategori Cukup Baik, yaitu sebanyak 55%. Pada sub indikator kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis berada pada kategori cukup baik yaitu 40 %. Kemudian pada sub indikator peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan berada pada kategori cukup baik yaitu 70 %. Sertapada sub indikator adanya diskusi atau tanya

jawab antar pembimbing dan yang dibimbing berada pada indikator cukup baik, yaitu 55%.

Peneliti melakukan wawancara dengan Lurah Sungai Sibam mengenai bimbingan pada Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam pengarahan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam pada kutipan wawancara berikut ini:

“Bimbingan pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam sangat kami perhatikan. Kegiatan bimbingan ini akan dilaksanakan setiap 1 bulan sekali dengan mengahdirkan pihak desa seperti Pak RT/RW. Kegiatan ini isinya ya membimbing masyarakat atau mengarahkan masyarakat jika terdapat kendala atau memiliki aspirasi untuk membangun desa dengan cara berdiskusi antar anggota”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam telah mendapatkan bimbingan dari kelurahan dengan cara berdiskusi dalam kegiatan tersebut. Acara tersebut berisi tanya jawab antara masyarakat, RT dan RW serta anggota lembaga kemasyarakatan.

Hasil observasi penelitian mengenai bimbingan pada lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam diketahui terdapat surat keluar dari pihak kelurahan untuk menghadiri rapat 1 bulan sekali dengan mengahdirkan pihak desa seperti Pak RT/RW dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan program lembaga kemasyarakatan. Dengan hal ini dapat disimpulkan bahwa pihak kelurahan benar mengadakan kegiatan pengarahan ini. Penulis juga menemukan surat kehadiran rapat setiap bulanya dalam rapat kelurahan dan juga dilengkapi dengan berita acara rapat oleh notulen yang menulis pertanyaan dan jawaban dalam rapat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Sungai Sibam melakukan pengarahan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam telah mendapatkan bimbingan.

2. Rekapitulasi Jawaban Responden dalam Kusioner Pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Berikut ini adalah rekapitulasi pelaksanaan Tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terdiri dari dua bagian Tugas yaitu 1) penyuluhan, 2) Pengarahan, 3) Bimbingan.

Tabel V.7 Rekapitulasi Indikator Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

	Sub indikator	Frekuensi (orang)			Hasil
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Membuat program penyuluhan	5 (25%)	8(40%)	7 (35%)	Cukup Baik
2	Melaksanakan program yang telah dibuat	5 (25%)	13 (65%)	2 (10%)	Cukup Baik
3	Mengevaluasi program dari hasil	6 (30%)	9 (40%)	5 (25%)	Cukup Baik
4	Memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan	11 (55%)	9 (45%)	0	Baik
5	Mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan	15 (75%)	5 (25%)	0	Baik
6	Kegiatan yang dilakukan atau yang diikuti oleh semua anggota RT dan RW diberikan secara tertulis	10 (50%)	8 (40%)	2 (10%)	Baik
7	Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang	5 (25%)	14 (70%)	1 (5%)	Cukup Baik

	disampaikan dalam kegiatan				
8	Adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	Cukup Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil penelitian pada setiap indikatornya. Pada indikator penyuluhan kategori baik ada pada indikator membuat program penyuluhan dan kategori kurang baik pada indikator melaksanakan program yang telah dibuat, serta kategori cukup baik dalam mengevaluasi program dari hasil tersebut.

Pada indikator kedua kategori baik ada pada sub indikator memberikan arahan berhubungan dengan bidang pemerintahan, dalam hal ini kelurahan memberikan materi arahan yang jelas dan terstruktur sehingga peserta memahami arahan yang diberikan. Kategori baik pada sub indikator mengumpulkan setiap penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan.

Pada indikator ketiga, kategori cukup baik pada sub indikator peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, dalam hal ini pelaksana tidak hanya menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kelembagaan namun juga mencari *feedback* atau tanggapan dari anggota lainnya sehingga seluruh peserta kegiatan memahami apa yang telah disampaikan. Kategori kurang baik pada subindikator adanya diskusi atau tanya jawab antar pembimbing dan yang dibimbing.

2. Hambatan pelaksanaan Tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru

Dalam perkembangannya menjadi sebuah organisasi, ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pencapaiannya dalam merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor pendukung adalah hal-hal yang membantu perkembangan organisasi secara internal maupun eksternal. Sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat perkembangan organisasi secara internal maupun eksternal.

1. Kapabilitas Organisasi

Kapabilitas organisasi merupakan salah satu faktor internal yang penting dalam mengelola sumber daya yang sudah dimiliki organisasi agar organisasi mampu meraih kinerja yang baik. Ketika kapabilitas yang ada dalam organisasi baik, maka pengelolaan sumber daya akan menjadi baik, terutama ketika sumber daya yang dimiliki organisasi sudah baik dan kelak akan mampu meraih kinerja yang lebih baik. Kapabilitas perusahaan dipahami beberapa peneliti sebagai kemampuan organisasi dalam melakukan tugas atau aktivitasnya dengan terkoordinir demi pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan wawancara dengan lurah kelurahan Sibam mengemukakan bahwa:

“Dalam organisasi itu lingkungan kerja sangatlah penting. Kemudian dalam sebuah organisasi ada yang namanya lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal ini salah satunya kapabilitas organisasi. Penting adanya kapabilitas agar pegawai di setiap bagian kelurahan mampu bekerja dengan baik..”

Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan informan mengenai lingkungan eksternal:

“Di kantor kita tidak terlalu terganggu dengan hal ini, kalau menurut saya hubungan antar pegawai harmonis, kebijakan barupun masih bisa ditolerir, hanya saja kekurangan SDM kadang juga membuat pegawai disini menjadi overload dalam bekerja, akhirnya kinerja tidak begitu maksimal.

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber. Problem yang sering timbul berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Proses kerja sama yang berlangsung dalam organisasi juga kadang-kadang merupakan penyebab dilakukannya perubahan. Beberapa faktor faktor internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Misalnya banyanya program, kurang bagusnya hubungan antar pegawai atau pegawai dengan atasan. Masalah keuangan organisasi atau juga masalah kebijakan baru. Hal-hal seperti ini akan menghambat kinerja pegawai.

Hubungan antar anggota yang kurang harmonis juga merupakan salah satu problem yang lazim terjadi. Problem atasan bawahan yang sering timbul adalah problem yang menyangkut pengambilan keputusan dan komunikasi. Keputusan pimpinan yang berkenaan dengan system pengupahan, misalnya dianggap tidak adil atau tidak wajar oleh bawahan, atau putusan tentang pemberlakuan jam kerja yang dianggap terlalu lama dan lain-lain.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang perlu dikaji dalam penentuan pengambilan suatu keputusan. Pengenalan dan pemahaman tentang berbagai kondisi serta dampaknya menjadi hal mutlak yang harus ditelaah lebih lanjut dikarenakan oleh beberapa hal. Berikut ini adalah hasil wawancara peneliti:

“ Kalau faktor eksternal itu keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Di kantor lurah Kleurahan Sibam yang paling menonjol adalah susunan dan pelaksanaan pergantian wewenang dalam bertugas. Terkadang pergantian kepala Badabagian dan juga kurangnya fasilitas dalam hal teknologi menjadi penghambat dalam melaksanakan pekerjaan” .

Berdasarkan wawancara diatas penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi dan peraturan pemerintah.

Perkembangan dan kemajuan teknologi juga merupakan penyebab penting dilakukannya perubahan. Penggantian perlengkapan lama dengan perlengkapan baru yang lebih modern menyebabkan perubahan dalam berbagai hal, misalnya: prosedur kerja, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, jenis bahan baku, jenis output yang dihasilkan, system penggajian yang diberlakukan yang memungkinkan jumlah bagian-bagian yang ada dikurangi atau hubungan pola kerja diubah karena adanya perlengkapan baru.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian tugas lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan tugas Lurah Dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung sekaki Kota Pknbaru dalam kategori cukup baik.
2. Terdapat faktor penghambat pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yaitu faktor dari internal maupun eksternal.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar dapat mengatasi hambatan internal yang berkaitan dengan hubungan sesama anggota organisasi pada umumnya menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota.
2. Mengatasi hambatan eksternal seperti memberikan pengarahan pada masyarakat agar lebih mengetahui fungsi pembinaan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku-Buku

- Ahmad Tanzeh. 2009. Pengantar Metode penelitian. Yogyakarta: Teras.
- Akbar, P.S. & Usman, H. 2011. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
- Arikunto, Suharsini. 2011. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta
- Dunn, William. 2003. Analisa Kebijakan Publik. (Samodra Wibawa, Penerjemah). Yogyakarta: Gajah Mada University Press,
- Inu Kencana Syafii,. 2009. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Refika Aditama. Bandung
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartini Kartono. 2011. Pemimpin dan Kepemimpinan, Jakarta: PT. Rajawaliigrafindo Persada.
- Manullang. 2009. Dasar- Dasar Manajemen. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Mathis dan Jackson. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Miftah Thoha. 2007. Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi. Pusdiklat Pegawai Depdiknas. Sawangan. Bogor
- Moenir, 2003. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Nawawi, H. Hadari dan H.M. Martini Hadari. 2004. Ilmu Admnistrasi. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jilid 1-2. Rineka Cipta. Jakart
- Ni'Matul Huda. 2009, Hukum Pemerintah Daerah, Bandung:Penerbit Nusa Media
- Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy*. Jakarta: PT. Gramedia

Permadi. 2010. Profesionalisme Aparatur Negara dalam Meningkatkan Pelayanan dan Perilaku Politik Publik. Jakarta: Widya Praja.

Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Rahardjo Adisasmata. 2004. Manajemen Pemerintah Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Santoso, Priyo Budi. 2015. Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural. Bina Aksara. Jakarta

Soekanto, Soerdjono & Sri Mamudji, 2002, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutopo, Heribertus. 1988. Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teori dan Praktis. Surakarta: UNS Press

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Administrasi. AlfaBeta. Bandung

Sunaryo Kartadinata, dkk, 2008. Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal. Jakarta : Depdiknas.

Sutopo, Heribertus. 2001. Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teori dan Praktis. Surakarta: UNS Press

Wasistiono, Sadu. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Sumedang: Alqoprint.

Sunyoto Danang. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Buku Seru

Rosidin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Bandung: CV. Pustaka Setia

Wanadiana .2010. Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan daerah

Permendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

